



KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa dihaturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan anugerah-Nya kita masih dimampukan untuk terus berkarya dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai terlebih khusus Kabupaten Kepulauan Talaud serta atas terselesaikannya penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) yang sebelumnya dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana yang tertuang dalam agenda reformasi birokrasi pemerintahan Presiden Jokowi – JK. Menyadari hal ini maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus giat berupaya agar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kabupaten Kepulauan Talaud semakin membaik sehingga mampu menggambarkan secara valid dan transparan tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja atas indikator-indikator kinerja yang sudah diperjanjikan.

Dengan mengusung Visi **"Mewujudkan masyarakat Kepulauan Talaud yang rukun dan damai, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"** dengan 6 (enam) Misi yaitu: 1) Membangun Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada layanan masyarakat. 2) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berorientasi pada keahlian, profesional *"the right man on the right place"*. 3) Mengembangkan manajemen pendidikan yang berkualitas dengan berorientasi pada peningkatan SDM. 4) Membangun sistem pelayanan kesehatan yang murah, cepat, ramah dan manusiawi. 5) Membangun percepatan dan peningkatan infrastruktur. 6) Meningkatkan peran agama, adat, budaya dalam rangka menciptakan masyarakat Talaud yang rukun dan damai. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 ini dapat memberikan gambaran yang valid dan komprehensif baik kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat maupun seluruh *stakeholder* pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melihat capaian keberhasilan ataupun prestasi sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud, kedepan dapat lebih terukur, tepat sasaran dan implementatif.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam LKj.IP ini agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang. Namun

demikian, ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, kami menyadari bahwa LKj.IP ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan dari LKj.IP ini sangat kami hargai.

Semoga penyajian LKj.IP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016 ini menjadi cermin serta sebuah umpan balik bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek pemahaman, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun kondisi pelaksanaannya.

Terima kasih.

Melonguane, Maret 2017

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Kab. Kepulauan Talaud	11
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategik	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Analisis Capaian Kinerja	26
1. Terwujudnya Birokrasi yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan non diskriminatif	26
2. Terwujudnya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam pelayanan prima dan sistem informasi terintegrasi	31
3. Meningkatnya manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat	36
4. Meningkatnya kapasitas aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	39

5. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas yang mampu menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan unggulan IPTEK dan bahasa Internasional	45
6. Terwujudnya prestasi di bidang olah raga dan sosial budaya pada tingkat regional dan Nasional	54
7. Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasis SPM dengan standar biaya yang jelas dan terjangkau secara ekonomi oleh seluruh masyarakat	58
8. Terwujudnya Pembangunan Daerah berdasarkan tata ruang wilayah	72
9. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah untuk mewujudkan pelayanan Prima	73
10. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang memiliki infrastruktur yang memenuhi standar	75
11. Meningkatnya akses sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, lancar, aman, dan nyaman ke seluruh wilayah	85
12. Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat	87
13. Meningkatnya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim	90
14. Terwujudnya perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan hidup	91
15. Meningkatnya pembangunan pariwisata dan pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (cagar budaya) ..	94
16. Meningkatnya peran lembaga keagamaan, kepemudaan dan fungsi pranata sosial masyarakat dalam kerukunan dan pelaksanaan pembangunan daerah	97
17. Meningkatnya pengamanan dan keamanan di Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar NKRI	98
18. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam semua aspek pembangunan	100
19. Meningkatnya Penerapan norma keluarga kecil bahagia sejahtera	102
20. Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat	104
B. Realisasi Anggaran	114
BAB IV PENUTUP	116

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- B. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- C. Daftar Penghargaan yang pernah di terima Kab. Kepl. Talaud
- D. Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kab. Kepl. Talaud

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Nama Pulau, Luas dan Keterangan Pulau	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk dan KK menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2016	19
Tabel 3.1	Kategori Pengukuran Kinerja	26
Tabel 3.2	Perkembangan Angka Rata-rata Lama sekolah dengan Kabupaten/Kota se Prov. Sulawesi Utara selang tahun 2013-2015	47
Tabel 3.3	Perbandingan Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Prov. Sulawesi Utara selang tahun 2013-2015	60
Tabel 3.4	Perbandingan dan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara Selang tahun 2010-2014	111
Tabel 3.5	Perbandingan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut dan Nasional Selang 2011 -2014	113

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Uraian	Halaman
Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud	3
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Kepulauan Talaud dan Batas Negara	4
Gambar 3.1	Kegiatan Rapat/Pertemuan Tim Penyusun Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Talaud	44
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan Angka Rata-rata lama sekolah Kab/Kota se Provinsi SULUT Selang Tahun 2013 – 2015	47
Gambar 3.3	Diagram Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK Kab. Kepulauan Talaud Tahun 2015	49
Gambar 3.4	Diagram Jumlah Kelulusan Siswa SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Kepulauan Talaud Selang 2010-2014	52
Gambar 3.5	Grafik Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud selang Tahun 2012-2015	60
Gambar 3.6	Kegiatan Pembangunan Optimalisasi Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kab. Kepulauan Talaud	81
Gambar 3.7	Kegiatan Pembangunan Drainase/Talut dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kepulauan Talaud	83
Gambar 3.8	Pembangunan Jalan yang di Pantau Langsung Oleh Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, SE	86
Gambar 3.9	Beberapa Objek Wisata/Situs Budaya yang masih terpelihara baik di Kabupaten Kepulauan Talaud	95
Gambar 3.10	Pembangunan Objek Wisata baru di Kabupaten Kepulauan Talaud	96
Gambar 3.11	Grafik Perkembangan Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Talaud Selang Tahun 2012 - 2015	106
Gambar 3.12	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kepulauan Talaud Selang 2010 - 2015	109
Gambar 3.13	Grafik Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014	110

Gambar 3.14	Grafik Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Talaud Selang Tahun 2011 -2015	112
Gambar 3.15	Diagram Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud selang 2011-2015	113
Gambar 3.16	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi KabupatenKepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional	114

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Partisipasi (Demokrasi) artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas dan terukur. Sehingga pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memberi dampak kemanfaatan yang signifikan dan berkelanjutan pada seluruh lini kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan maksud tersebut pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus melakukan langkah penyesuaian antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja dari masing-masing instansi pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana hal ini merupakan upaya penguatan dari berbagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan penerapan *result oriented government* atau pemerintahan yang berorientasi pada hasil, dimana kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 yang menjabarkan dan menggambarkan pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selang Tahun anggaran 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019.

Pencapaian 20 sasaran strategis Kabupaten Kepulauan Talaud dicapai dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 431.727.826.603,31 dan terealisasi sebesar Rp. 395.440.996.448,00 atau sebesar 91,59%. Adapun total target pendapatan Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016 berjumlah Rp. 829.632.925.008,00 dengan total realisasi Rp. 797.467.418.364,00 atau sebesar 96,12%, dan total belanja Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016 adalah Rp. 890.415.341.478,00 dengan total realisasi Rp. 834.589.779.563,00 atau sebesar 93,73%.

Dalam tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan 20 sasaran strategis dengan jumlah indikator sasaran sebanyak 121 indikator melalui pelaksanaan program/kegiatan. Pelaksanaan evaluasi kinerja difokuskan pada capaian setiap indikator kinerja dengan memperhatikan tiga unsur utama, yaitu: Perjanjian Kinerja, Sistem Pengumpulan Data Kinerja, dan Pengukuran Kinerja. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud **telah berhasil** mencapai sebagian besar sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kinerja Tahun 2016, meskipun capaian tersebut untuk beberapa kegiatan belum sepenuhnya 100% yaitu ; 13 capaian indikator rata-rata sasaran strategis terkategori **Baik Sekali**, 3 capaian indikator rata-rata sasaran strategis terkategori **Baik**, 3 capaian indikator rata-rata sasaran strategis terkategori **cukup** dan 1 capaian indikator rata-rata sasaran strategis terkategori **kurang**.

Indikator-indikator sasaran yang belum sepenuhnya tercapai 100% menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk berusaha lebih keras di masa mendatang guna mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran yang belum mencapai 100%. Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2016 ini, akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan di masa-masa mendatang. Berbagai langkah antisipatif akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.